PEMERINTAHAN KOTA LHOKSEUMAWE

PERUBAHAN RENCANA KERJA

2026



DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN GAMPONG



KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3-5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
TAHUN 2026

NOMOR : /P-RENJA-DPMG/2026

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3-511 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
11. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer Ke Daerah Tahun 2006 Dalam APBD Bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Propvinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;
2. Surat Edaran Wali Kota Lhokseumawe Nomor 008.2.4/646/SE/2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dengan Daftar Nomor Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA dan PPASP) Tahun 2026;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 September 2026

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAIFUL BAHRI ABUBAKAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3- 511 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR NOMOR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

NO	NOMOR RENJA	NAMA PERANGKAT DAERAH
1	*2*	*3*
1	01/P-Renja-PK/2026	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	02/ P-Renja-Dinkes/2026	Dinas Kesehatan
3	03/P-Renja-PUPR/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	04/P-Renja-Kesbangpol/2026	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	05/P-Renja-Satpol PP/2026	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
6	06/P-Renja-Dinsos/2026	Dinas Sosial
7	07/P-Renja-DPMPTSP dan Naker/ 2026	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8	08/P-Renja-PP, PA dan KB/2026	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	09/P-Renja-DKPP dan Pangan/2026	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
10	10/P-Renja-DPN/2026	Dinas Pertanahan
11	11/P-Renja-DLH/2026	Dinas Lingkungan Hidup
12	12/P-Renja-Disduk Capil/2026	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	13/P-Renja-DPMG/2026	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
14	14/P-Renja-Dishub/2026	Dinas Perhubungan
15	15/P-Renja-Diskominfo/2026	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
16	16/P-Renja-Disperindagkop dan UKM/2026	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
17	17/P-Renja-Disporapar/2026	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
18	18/P-Renja-Arpus/2026	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	19/P-Renja-Setdako/2026	Sekretariat Daerah Kota
20	20/P-Renja-Sekwan/2026	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota

NO	NOMOR RENJA	NAMA PERANGKAT DAERAH
1	*2*	*3*
21	21/P-Renja-Banda Sakti/2026	Kecamatan Banda Sakti
22	22/P-Renja-Muara Dua/2026	Kecamatan Muara Dua
23	23/P-Renja-Blang Mangat/2026	Kecamatan Blang Mangat
24	24/P-Renja-Muara Satu/2026	Kecamatan Muara Satu
25	25/P-Renja-BPBD/2026	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26	26/P-Renja-Inspektorat/2026	Inspektorat
27	27/P-Renja-Bappeda/2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
28	28/P-Renja-BPKD/2026	Badan Pengelola Keuangan Daerah
29	29/P-Renja-BKPSDM/2026	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
30	30/P-Renja-DSI dan Pendidikan Dayah/2026	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
31	31/P-Renja-MPU/2026	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
32	32/P-Renja-Baitul Mal/2026	Sekretariat Baitul Mal
33	33/P-Renja-MAA/2026	Sekretariat Majelis Adat Aceh
34	34/P-Renja-MPD/2026	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

KAYUTI ABUBAKAR

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Perubahan Renja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika perkembangan kebijakan, kebutuhan masyarakat, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Dokumen ini memuat perubahan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, serta pagu anggaran yang diselaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe (RKPK) Tahun 2026 dan kebijakan pembangunan daerah.

Penyusunan Perubahan Renja ini bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong tetap berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan gampong, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, penguatan pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan, sinergi, dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan Perubahan Renja ini dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Lhokseumawe, September 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Gampong Kota Lhokseumawe



SAFRIADI, S.STP, M.S.M
PembinaTK.I
NIP. 19841117 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN..... I-I
1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dan Gampbaran Tentang Perubahan Ekonomi Daerah I-4
1.3 Maksud dan Tujuan I-5
1.4 Sistematika Penulisan I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAUN BERKENAAN..... II-1
2.1 Realisasi Kinerja Dan Anggaran Kegiatan Renja Perangkat Daerah II-1
2.2 Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah..... II-3

BAB III RENCANA KERJA DAN PEDOMAN PERANGKAT DAERAH .II-1
3.1 Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah III-1
3.2 Perubahan Indikator Kinerja Program III-3
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah III-4

BAB IV PENUTUP IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026 ..... II.5
Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ..... III.10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 telah dijalankan hingga triwulan ke-2. Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2026 serta Tujuan dan Sasaran RPJMK Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan RKPK Tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
4. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
5. dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPK Tahu 2026.
6. memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPK dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPK menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPK Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBK Tahun 2026.
7. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005;
8. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;

9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembengunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 juga dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan perencanaan kegiatan daerah Tahun 2026 di Kota Lhokseumawe.

1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dan Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Lhokseumawe No 0008.2.4/640/SE/2026 tentang pedoman penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2026 tanggal 05 juni 2026. Dasar pertimbangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan gambaran tentang perubahan asumsi daerah meliputi: (1) adanya pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; dan (2) adanya perubahan perkembangan kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan. Kedua pertimbangan tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut ini.

1. Adanya pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

   Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseuamawe Tahun 2026 perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

   a. adanya penyesuaian pendapatan dan efesiensi APBD Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;

b. berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026;
c. adanya pelimpahan anggaran dari APBD Provinsi Aceh Ke APBK Lhokseumawe untuk belanja Biaya Operasional Mukim Gampong di Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026.
d. adanya penyesuaian terhadap standar satuan harga, sasaran dan hasil yang harus dicapai, dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026;
e. adanya berbagai permasalahan yang berkembang sehingga perlu menjadi prioritas penanganan secara cepat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBK-P) Tahun 2026. Oleh karena itu beberapa program dan kegiatan perlu disesuaikan dalam Perubahan RKPK Tahun 2026 dan Perubahan Renja Tahun 2026.

2. Adanya tambahan penyesuaian gaji PPPK s.d Desember, berdasarkan keputusan Menteri Keuanagan (KMK) No.198 Tahun 2026 yang mengatur tentang penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026, penyaluran kurang bayar dana Bagi Hasil (DBH) serta dana Treasury Deposit Facility (TDF).
3. Adanya perubahan perkembangan kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
   - Kondisi Perekonomian Nasional dan Daerah Perubanah RPJMK Kota Lhokseumawe Tahun 2026 dipengaruhi oleh perubahan asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional dan Daerah yang diperkirakan akan terjadi pada Tahun 2026.

     .

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat perubahan program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi

tolok ukur penilaian kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2026.

Sedangkan tujuan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah:

1. menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Perangkat Daerah dengan berdasarkan pada Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026;
2. pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Gambaran tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026
- 2.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Renja Perangkat Daerah
- 2.2 Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Dearah
- 3.1 Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Perubahan Indikator Kinerja Program
- 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Realisasi Kinerja Dan Anggaran Kegiatan Renja Perangkat Daerah

Rata-rata realisasi kinerja kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Tahun 2026 sampai dengan triwulan II mencapai 24,37% dengan kategori sangat rendah, dan realisasi anggaran sebesar 49,50% dengan kategori sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Tahun 2026 sampai dengan triwulan II secara umum tergolong kurang baik, dikarenakan kegiatan baru akan dilaksanakan namun sudah dalam proses pergeseran anggaran dalam rangka penyesuaian pendapatan. Selain itu juga diperlukan upaya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan selanjutnya agar tidak menimbulkan SILPA dalam jumlah yang besar.

Berikut ini akan disajikan perkembangan kinerja masing-masing urusan pembangunan.

- Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

  Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan triwulan II tahun 2026 sebesar 24.37% dengan kategori sangat rendah, dan realisasi anggaran sebesar 49.50% dengan kategori sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja perlu dioptimalkan dan realisasi anggaran perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Capaian s/d Triwulan II).

Uraian mengenai pencapaian kegiatan per program akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, prestasi kinerjanya sampai dengan Triwulan II tahun 2026 sebesar 40,47% dengan kategori sangat rendah, dan realisasi

anggaran sebesar 59,63% dengan kategori sangat rendah. Program ini terdiri dari 7 kegiatan rutin antara lain Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dimana pelaksanaanya semuanya sudah berjalan.

2. Program Penataan Desa

   Prestasi kinerjanya sampai dengan Triwulan II tahun 2026 sebesar 0% kategori sangat rendah sedangkan realisasi anggaran 0% kategori sangat rendah karena belum teralisasi pada pagu anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PD) Tahun 2026.

3. Program Kerjasama Antar Desa

   Prestasi kinerjanya sampai dengan Triwulan II tahun 2026 sebesar 0% kategori rendah sedangkan realisasi anggaran 0% kategori sangat rendah karena blm teralisasi pada pagu anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PD) Tahun 2026.

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

   Prestasi kinerjanya sampai dengan Triwulan II tahun 2026 sebesar 8.24% kategori sangat rendah sedangkan realisasi anggaran 13.31% kategori sangat rendah. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dimana pelaksanaanya semuanya sudah berjalan. Dimana program ini memiki dua indikator yaitu Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya, dan Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa. Ada Pun Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya Prestasi kinerjanya sampai dengan Triwulan II tahun 2026 sebesar 102.02% dengan kategori sangat rendah sedangkan realisasi anggaran sebesar 20.16% dengan kategori sangat rendah dan Persentase Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Prestasi kinerjanya sampai dengan Triwulan II tahun 2026 sebesar 0% dengan kategori sangat rendah sedangkan realisasi anggaran sebesar 0% dengan kategori sangat rendah.

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat

   Prestasi kinerjanya sampai dengan Triwulan II tahun 2026 sebesar 0% kategori sangat rendah sedangkan realisasi anggaran 0% kategori sangat rendah . Program ini memiki dua indikator yaitu Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat. Ada pun Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Prestasi kinerjanya sampai dengan Triwulan II tahun 2026 sebesar 43.59% dengan kategori sangat rendah sedangkan realisasi anggaran sebesar 33.33% dengan kategori sangat rendah dan Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Prestasi kinerjanya sampai dengan Triwulan II tahun 2026 sebesar 25% dengan kategori sangat rendah sedangkan realisasi anggaran sebesar 25% kategori sangat rendah. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2.2 Kesimpulan Dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil evaluasi Renja dan DPA-PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2026 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut:

a. rata-rata realisasi kinerja kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe sampai dengan triwulan II tahun 2026 mencapai 24.37% dengan kategori sangat rendah, dan realisasi anggaran sebesar 0.00% dengan kategori sangat rendah. Rendahnya kinerja dan realisasi keuangan tidak sepenuhnya diakibat rendahnya performa Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, namun karena kegiatan sedang berjalan atau kegiatan yang direncanakan belum dapat dilaksanakan diakibatkan adanya penyesuaian pendapatan belanja daerah pada APBK Lhokseumawe sehingga realisasi anggaran yang tersedia masih rendah.

b. terdapat beberapa kendala dalam pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2026, baik menyangkut aspek teknis pelaksanaan pekerjaan, maupun berkaitan dengan pertanggungjawaban, sehingga penyerapan anggaran masih sangat rendah.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2026 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut:

1. serapan anggaran dalam kategori sangat rendah akan ditingkatkan lagi sesuai dengan target capaian program kegiatan yang telah dianggarkan dalam DPPA-PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
2. Sekretaris dan Kepala Bidang diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe sampai dengan triwulan II tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-SKPD
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KOTA LHOKSEUMAWE
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2026

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**29.847.771**		**3.876.880**		**4.349.042**		**1.085.657**		**1.066.941**						**2.152.599**	**18,94**	**49,5**		**2.152.599**	**5,99**	**7,21**		
		2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**22.356.122**		**3.334.790**		**3.523.542**		**1.085.657**		**1.015.517**						**2.101.175**	**40,47**	**59,63**		**2.101.175**	**14,08**	**9,4**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	315,6		62,7		62,80				0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			70.000		6.355		10.000		-		1.067						1.067	53,33	10,67		1.067	10,67	1,52		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	75		15		15		0		8						8		53,33		8		10,67			
		2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			70.000		6.355		10.000		-		1.067						1.067	53,33	10,67		1.067	10,67	1,52		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	75		15		15		0		8						8		53,33		8		10,67			
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.044.832		2.641.831		3.006.424		1.062.358		945.111						2.007.468	68,9	66,77		2.007.468	11,64	11,12		
			Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Serta Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3806		322		643		243		200						443		68,9		443		11,64			
		2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.044.832		2.641.831		3.006.424		1.062.358		945.111						2.007.468	68,9	66,77		2.007.468	11,64	11,12		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3806		322		643		243		200						443		68,9		443		11,64			
		2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			300.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Data dan Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	65		0		71		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			210.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	65		0		71		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			90.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			666.400		109.002		97.280		5.922		14.053						19.975	49,33	20,53		19.975	10,24	3		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		12						12		100		12		20			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		12						12		100		12		20			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	235		235		235		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	125		26		30		2		12						14		46,67		14		11,2			
		2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			75.000		20.582		15.000		-		2.499						2.499	100	16,66		2.499	20	3,33		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		12						12		100		12		20			

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			75.000		14.900		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			75.000		8.177		15.000		-		2.500						2.500	100	16,66		2.500	20	3,33		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0		12						12		100		12		20			
		2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			11.400		760		2.280		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	235		235		235		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			430.000		64.583		50.000		5.922		9.054						14.976	46,67	29,95		14.976	11,2	3,48		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	125		26		30		2		12						14		46,67		14		11,2			
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			827.612		221.813		59.612		-		2.960						2.960	0	4,97		2.960	50	0,36		
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		3						3		0		3		100			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		4		3		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			368.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			459.612		110.907		-		-		2.960						2.960	0	0		2.960	100	0,64		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		3						3		0		3		100			
		2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		110.907		59.612		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		4		3		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.420.878		271.447		274.546		15.321		39.141						54.462	66,67	19,84		54.462	13,33	3,83		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		0		12						12		100		12		20			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.580		2.188		1.980		-		492						492	100	24,85		492	20	4,65		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		0		12						12		100		12		20			
		2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			528.000		37.996		96.000		9.400		11.554						20.954	50	21,83		20.954	10	3,97		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			882.298		231.263		176.566		5.922		27.095						33.017	50	18,7		33.017	10	3,74		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.026.400		84.342		75.680		2.057		13.186						15.242	40	20,14		15.242	10	1,49		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		22		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	22		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			183.150		38.922		36.630		1.244		6.980						8.224	100	22,45		8.224	20	4,49		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
		2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			140.250		35.568		28.050		813		3.246						4.059	100	14,47		4.059	20	2,89		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
		2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			650.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		9.853		-		-		2.960						2.960	0	0		2.960	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		22		10		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			53.000		-		11.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	22		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**			**392.844**		**-**		**10.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	38,24		8,82		14,71		0		0						0		0		0		0			
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			392.844		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Penataan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	26		0		68		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	26		0		68		0		0						0		0		0		0			
		2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa			59.664		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	26		0		68		0		0						0		0		0		0			
		2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			333.180		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	26		0		68		0		0						0		0		0		0			
		2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**			**474.076**		**-**		**10.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	36,76		14,71		17,65		0		0						0		0		0		0			
		2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			474.076		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kerjasama Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	25		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	8		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			303.300		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	25		0		4		0		0						0		0		0		0			
		2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			170.776		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	8		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**2.902.332**		**123.450**		**386.500**		**-**		**51.424**						**51.424**	**8,24**	**13,31**		**51.424**	**1,65**	**1,77**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	23,79		192,62		19,76		0		20,16						20,16		102,02		20,16		84,74			
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	498,25		66,65		99,55		29,47		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			2.902.332		123.450		386.500		-		51.424						51.424	8,24	13,31		51.424	1,65	1,77		
			Terlaksannya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	3		4		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	25		5		5		0		2						2		40		2		8			
				Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	68		68		68		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	68		68		68		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	5		0		68		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			60.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			60.000		2.820		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			128.000		9.360		15.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	3		4		3		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			545.000		47.731		75.000		-		22.188						22.188	40	29,58		22.188	8	4,07		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	25		5		5		0		2						2		40		2		8			
		2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			440.000		2.716		40.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	68		68		68		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			40.000		5.219		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			40.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			255.000		2.715		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			272.000		14.724		169.500		-		29.236						29.236	100	17,25		29.236	20	10,75		
			Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
		2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			68.600		5.199		7.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			82.500		6.705		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa			61.500		2.685		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			71.500		5.274		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			326.732		5.086		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	68		68		68		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			235.000		-		10.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	5		0		68		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa			61.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			155.000		13.214		20.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
	2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**				**3.722.397**		**418.641**		**419.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	406,85		73,53		76,47		33,33		33,33						33,33		43,59		33,33		8,19			
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	500		25		100		25		25						25		25		25		5			
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.722.397		418.641		419.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	5		0		68		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			412.680		66.101		33.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			165.600		17.336		30.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			226.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	5		0		68		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			90.400		6.807		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			748.000		83.293		70.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			67.800		4.912		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa			67.800		5.273		-		-		-						-	0	0		-	0	0		

Seluruh nilai pada kolom Rp dikalikan 1.000

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	Rp (x 1000)	K	%	K	Rp (x 1000)	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			1.944.117		234.919		286.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		JUMLAH				**29.847.771**		**3.876.880**		**4.349.042**		**1.085.657**		**1.066.941**						**2.152.599**				**2.152.599**				
		Rata-rata capaian kinerja (%)																			**18,94**	**49,5**			**5,99**	**7,21**		**SUB KEGIATAN**
		Predikat kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		Rata-rata capaian kinerja (%)																			**24,37**				**13,99**			**PROGRAM**
		Predikat kinerja																			**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya :

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Hasil Analisis capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2026 tidak berdampak secara langsung terhadap target indikator kinerja Dpmg Kota Lhokseumawe, sehingga tidak diperlukan perubahan indikator dan target indikator kinerja perangkat daerah. Tabel berikut ini memberikan gambaran indikator kinerja perangkat daerah Dpmg Kota Lhokseumawe Tahun 2026 beserta targetnya sebagai berikut :

Murni Tahun 2026						Perubahan Tahun 2026				
No	Tujuan	Sasaran	**Indikator**	**Satuan**	**Target 2026**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**	**Satuan**	**Target 2026**
	Meningkatnya Kualitas Keluarga, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pembangunan Pemuda.		Indeks Desa	Indeks	77,72	Meningkatnya Kualitas Keluarga, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pembangunan Pemuda.		Indeks Desa	Indeks	77,72
		Meningkatnya Strata Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	Persen	48,53		Meningkatnya Strata Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	Persen	48,53
		Meningkatnya Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	Angka	62,85		Meningkatnya Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	Angka	62,85

No	**Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Daerah**	**Satuan**	**Target Kinerja Tahun 2026**	**Target P- Renja Tahun 2026**
I	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
1	Indeks Desa	%	77,72	77,72
2	Persentase Desa Mandiri	%	48,53	48,53
III	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**			
1	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	13,79	13,79
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	14,71	14,71
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	17,65	17,65

4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	76,47	76,47
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100	100

3.2. Perubahan Indikator Kinerja Program

Dalam Rangka meningkatkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian terget Pembangunan Daerah dilakukan perubahan terhadap indikator Kinerja Program dalam dokumen perubahan rencana kerja (p-renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Tahun 2026.

Perubahan indikator kinerja program pada Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Mayarakat Dan Gampong Lhokseumawe Tahun 2026 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, capaian kinerja sampai dengan periode berjalan, serta penyesuaian target sesuai kebutuhan pelayanan dan kemampuan pendanaan daerah.

Perubahan indikator dan target kinerja program disajikan pada tabel berikut:

Murni Tahun 2026						**Perubahan Tahun 2026**		
No	**Program Prioritas Pembangunan**	**Indikator Kinerja Program**	**Satuan**	**Target Renstra**	**Target Indikator Kinerja Program**	**Indikator Program**	**Satuan**	**Target Indikator Kinerja Program**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	62,80	B / 62.70	NILAI SAKIP OPD	Kategori/ Point	B / 62.80
2.	Program Penataan Desa	Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persen	14,71	0,1471	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	0,1471
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persen	17,65	7,35	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persen	17,65%

4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	14,52	51.47	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	19,76%
		2. Persentase Fasilitasi TataKelola Desa	Persen	99,95	95	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persen	99,95
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Desa		68			
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitas Pemberdayaa n Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	100	0,7647	Persentase Fasilitasi Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD	Persen	0,7647
		Persentase Fasilitas Pemberdayaa n Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	76,47	54,10	Persentase Fasilitas Pemberdayaa n Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Ada	Persen	1

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan,

penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe naik dari APBD Kota Lhokseumawe Tahun 2026 yang semula sebesar Rp. 4.349.042.182,00 pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2026 menjadi Rp. 4.653.459.080,- ada penambahan sebesar Rp. 304.416.898,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim BPKP terhadap pelaksanaan kegiatan terkait kemiskinan ekstrem, ditemukan adanya perbaikan pada kegiatan belanja rutin, khususnya belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang dinilai belum secara langsung berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrem.

Hal tersebut disebabkan karena belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor digunakan untuk mendukung operasional Sekretariat TP PKK yang memiliki kantor sekretariat tersendiri. Sementara itu, belanja Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan digunakan untuk mendukung kegiatan lapangan TP PKK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, Tim BPKP menyarankan agar belanja dimaksud diberikan penandaan (hashtag) sebagai “Operasional Sekretariat PKK”, sehingga dapat dibedakan dengan belanja yang secara langsung mendukung output penanganan kemiskinan ekstrem. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, penandaan belanja telah dilakukan perubahan pada aplikasi SIPD sesuai dengan arahan Tim BPKP.

Selanjutnya, untuk mendukung output penanganan kemiskinan ekstrem, kegiatan TP PKK lebih diarahkan pada kegiatan pembinaan TP PKK Kecamatan dan Gampong yang memiliki keterkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,

antara lain melalui kegiatan Workshop Art Therapy (Trauma Healing) dan Gerakan ASRI.

Dengan demikian, perbaikan penandaan belanja telah dilakukan pada aplikasi SIPD, sedangkan kegiatan yang menjadi output penanganan kemiskinan ekstrem diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh TP PKK Kecamatan dan Gampong.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami penurunan ataupun kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini pada anggaran murni Tahun 2026 sebesar Rp. 3.523.542.182,00 dan pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 3.673.359.080,00 atau bertambah sebesar Rp. 149.816.898,00. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah semula anggaran murni tahun 2026 sebesar Rp. 10.000.000,00 dan pada perubahan Renja tahun 2026 menjadi Rp. 1.500.000,00 terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 8.500.000,00, terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

      Anggaran murni sebesar Rp. 10.000.000,00 dan pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 1.500.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 8.500.000,00 dikarenakan adanya pengurangan komponen belanja cetak serta belanja makanan dan minuman rapat.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah semula anggaran murni tahun 2026 sebesar Rp. 3.006.423.738,00 dan pada perubahan Renja tahun 2026 menjadi Rp. 3.053.653.000,00 terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 47.229.262,00, terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

      Anggaran murni sebesar Rp. 3.006.423.738,00 dan pada perubahan Renja tahun 2025 menjadi Rp. 3.053.653.000,00

atau bertambah sebesar Rp. 47.229.262,00 dikarenakan adanya penyesuaian gaji untuk komponen tunjangan.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah semula anggaran murni sebesar Rp. 97.280.000,00 dan pada perubahan Renja tahun 2026 menjadi Rp. 36.900.000,00 terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 60.380.000,00 terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu :
   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

      Anggaran murni sebesar Rp. 15.000.000,00 dan pada perubahan Renja tahun 2026 menjadi Rp. 2.500.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 12.500.000,00 dikarenakan adanya pengurangan komponen belanja peralatan dan perlengkapan kantor.
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

      Anggaran murni sebesar Rp. 15.000.000,00 dan pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 2.500.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 12.500.000,00 dikarenakan adanya pengurangan jumlah porsi pada komponen makanan dan minuman rapat.
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

      Anggaran murni sebesar Rp. 15.000.000,00 dan pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 2.500.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 12.500.000,00 dikarenakan adanya pengurangan jumlah komponen cetakan dan penggandaan.
   d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

      Anggaran murni sebesar Rp. 2.280.000,00 dan pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp.0,00 atau berkurang sebesar Rp. 0,00 dikarenakan adanya pengurangan pada belanja surat kabar/majalah menyesuaikan dengan kebutuhan.
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

      Anggaran murni sebesar Rp. 50.000.000,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 29.000.000,00 atau

berkurang sebesar Rp. 29.000.000,00 dikarenakan adanya pengurangan kebutuhan rapat koordinasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa baik di tingkat provinsi maupun nasional.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula anggaran murni sebesar Rp. 0,00 dan pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 0,00 terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:
   a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
      Anggaran murni sebesar Rp.0,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 0,00 dikarenakan tidak adanya anggaran pada komponen pengadaan belanja modal alat kantor dan rumah tangga lainnya.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah semula anggaran murni sebesar Rp. 274.546.080,00 dan pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 209.980.000,00 terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 64.980.000,00 terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu:
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
      Anggaran murni sebesar Rp. 1.980.000,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 500.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 1.480.000,00 dikarenakan adanya pengurangan penyediaan jasa surat menyurat.
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
      Anggaran murni sebesar Rp. 96.000.000,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 96.000.000,00.
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
      Anggaran murni sebesar Rp. 176.566.080,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 133.066.080,00 atau berkurang sebesar Rp. 63.500.000,00 dikarenakan adanya pengurangan pada komponen belanja.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah semula anggaran murni sebesar

Rp. 75.680.000,00 dan pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 371.740.000,00 terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 296.060.000,00 terdiri dari 3 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

   Anggaran murni sebesar Rp. 36.630.000,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 21.465.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 15.165.000,00 dikarenakan adanya pengurangan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

   Anggaran murni sebesar Rp. 28.050.000,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 14.775.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 13.275.000,00 dikarenakan adanya perubahan anggaran pada Perubahan Renja.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

   Anggaran murni sebesar Rp. 11.000.000,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 335.500.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 324.500.000,00 dikarenakan adanya penambahan pada komponen pemeliharaan/rehab sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

II. Program Penataan Desa

Program ini pada anggaran murni Tahun 2026 sebesar Rp. 10.000.000,00 dan pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 0,00 atau berkurang sebesar Rp. 0,00. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Penataan Desa. Anggaran murni sebesar Rp. 10.000.000,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 0,00 atau berkurang sebesar Rp. 0,00

dikarenakan adanya tidak adanya anggaran pada komponen belanja Penyelenggaraan Penataan Desa.

b. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa .Anggaran murni sebesar Rp. 10.000.000,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 0,00 atau berkurang sebesar Rp.0,00 dikarenakan tidak adanya anggaran pada komponen belanja Fasilitasi Sarana dan Prasaranan Desa.

III. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini pada anggaran murni Tahun 2026 sebesar Rp. 10.000.000,00 dan pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp.0,00. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

a. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa . Anggaran murni sebesar Rp. 10.000.000,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 0,00 dikarenakan tidak adanya anggaran pada komponen belanja Fasilitasi Kerja Sama antar Desa.

b. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota . Anggaran murni sebesar Rp. 10.000.000,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 0,00 dikarenakan tidak adanya anggaran pada komponen belanja Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota.

IV. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini pada anggaran murni Tahun 2026 sebesar Rp. 386.500.000,00 dan pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 346.700.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 39.800.000,00. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa semula anggaran murni sebesar Rp. 386.500.000,00 dan pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 346.700.000,00 terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 39.800.000,00 terdiri dari 10 Sub Kegiatan yaitu :

a. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa. Anggaran murni sebesar Rp. 15.000.000,00 pada Perubahan

Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 0,00 dikarenakan tidak adanya anggaran pada komponen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

   Anggaran murni sebesar Rp. 75.000.000,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 115.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 40.000.000,00 dikarenakan adanya penambahan pada komponen belanja perjalanan dinas Biasa dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

c. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

   Anggaran murni sebesar Rp. 40.000.000,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 0,00 dikarenakan tidak adanya anggaran pada Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

d. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa.

   Anggaran murni sebesar Rp. 20.000.000,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 0,00 dikarenakan adanya anggaran pada komponen Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa.

e. Penyelengaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

   Anggaran murni sebesar Rp. 177.700.000,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 231.700.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 54.000.000,00 dikarenakan adanya Penambahan komponen belanja Penyelengaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

f. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

   Anggaran murni sebesar Rp. 7.000.000,00 pada Perubahan Renja Tahun 2020 menjadi Rp. 0,00 di karenakan tidak adanya anggaran pada komponen Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

g. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.

Anggaran murni sebesar Rp. 10.000.000,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 anggaran tetap sebesar Rp. 0,00 di karenakan tidak adanya anggaran pada komponen Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.

h. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD.
   Anggaran murni sebesar Rp. 20.000.000,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 0,00 di karenakan tidak adanya anggaran pada komponen Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD.

i. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
   Anggaran murni sebesar Rp. 10.000.000,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 0,00 di karenakan tidak adanya anggaran pada komponen Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

j. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.
   Anggaran murni sebesar Rp. 20.000.000,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp.0,00 di karenakan tidak adanya anggaran pada komponen Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

V. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat.
   Program ini pada anggaran murni Tahun 2026 sebesar Rp. 419.000.000,00 dan pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 633.400.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 241.400.000,00. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

   1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.
      Anggaran murni sebesar Rp. 419.000.000,00 pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 633.400.000,00 atau

naik sebesar Rp. 214.400.000,00 terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

   Anggaran murni sebesar Rp. 0,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 43.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 43.000.000,00 dikarenakan adanya penambahan anggaran pada komponen Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

   Anggaran murni sebesar Rp. 0,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 50.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 50.000.000,00 dikarenakan adanya adanya penambahan anggaran pada komponen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

c. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

   Anggaran murni sebesar Rp. 70.000.000,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 0,00 dikarenakan tidak adanya anggaran pada komponen Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

d. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

   Anggaran murni sebesar Rp. 286.000.000,00 pada Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi Rp. 540.000.000,00 atau naik sebesar Rp. 254.000.000,00 dikarenkan adanya penambahan anggaran TKD untuk komponen belanja Kegiatan Gerakan Indonesia ASRI dan Trauma Healing Bagi Perempuan Korban Bencana.

Adapun rincian Perubahan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2026 dapat dilihat dalam Tabel 3.3 sebagai berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.0.00.0.00.02.0000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong**							**4.349.042.182,00**	**3.736.059.080,00**	**4.653.459.080,00**	**304.416.898,00**							**3.872.017.347,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.349.042.182,00**	**3.736.059.080,00**	**4.653.459.080,00**	**304.416.898,00**							**3.872.017.347,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**4.349.042.182,00**	**3.736.059.080,00**	**4.653.459.080,00**	**304.416.898,00**							**3.872.017.347,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah**				**B / 62,70 Persen B / 62.70 Persen**	**B / 62,70 Persen B / 62,80 Angka B / 62.80 Angka**	**3.523.542.182,00**	**3.343.359.080,00**	**3.673.359.080,00**	**149.816.898,00**					**Aparatur DPMG**		**3.274.517.347,00**	
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Unit	12 Unit	59.612.364,00	0,00	0,00	-59.612.364,00							0,00	
	2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				3 Unit	0 Unit	59.612.364,00	0,00	0,00	-59.612.364,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***63.00***	***0***	***62.60***			***3.463.929.818,00***	***3.343.359.080,00***	***3.673.359.080,00***	***209.429.262,00***						***62.70***	***3.274.517.347,00***	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	10.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-8.500.000,00							15.000.000,00	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				15 Dokumen	15 Dokumen	10.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-8.500.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Serta Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Dokumen	3.006.423.738,00	3.053.653.000,00	3.053.653.000,00	47.229.262,00							2.660.195.890,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				643 Orang/ bulan	643 Orang/ bulan	3.006.423.738,00	3.053.653.000,00	3.053.653.000,00	47.229.262,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			2.660.195.890,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Dokumen	97.280.000,00	36.900.000,00	36.900.000,00	-60.380.000,00							145.000.000,00	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-12.500.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-12.500.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-12.500.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				235 Dokumen	0 Dokumen	2.280.000,00	0,00	0,00	-2.280.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				30 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	-20.600.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	274.546.080,00	209.566.080,00	209.566.080,00	-64.980.000,00							371.073.457,00	
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	1.980.000,00	500.000,00	500.000,00	-1.480.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			2.420.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			108.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	176.566.080,00	113.066.080,00	113.066.080,00	-63.500.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			260.653.457,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Laporan	75.680.000,00	41.740.000,00	371.740.000,00	296.060.000,00							83.248.000,00	
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	36.630.000,00	21.465.000,00	21.465.000,00	-15.165.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			40.293.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	28.050.000,00	14.775.000,00	14.775.000,00	-13.275.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			30.855.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				10 Unit	10 Unit	11.000.000,00	5.500.000,00	335.500.000,00	324.500.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			12.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Meningkatnya Kualitas Penataan Desa**				**14,71 Persen**	**14,71 Persen**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**					**Pemerintah Gampong**		**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas penataan desa]	***Persentase Fasilitasi Penataan Desa***	***32.35***	***0***	***7.35***			***10.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-10.000.000,00***						***7.35***	***0,00***	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya Penataan Desa				10 Desa	10 Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00							0,00	
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi*				68 Unit	O Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa**				**7,35 Persen**	**7,35 Persen**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**					**Pemerintah Gampong**		**0,00**	
		[Meningkatnya efektivitas kerja sama desa]	***Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa***	***32.35***	***0***	***7.35***			***10.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-10.000.000,00***						***7.35***	***0,00***	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Kerja Sama Antar Desa				5 Desa	5 Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00							0,00	
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota*				4 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa**				**95,00 51,47 68 Persen Persen Desa**	**14,52 99,55 Persen Persen**	**386.500.000,00**	**292.700.000,00**	**346.700.000,00**	**-39.800.000,00**					**Pemerintahan Gampong dan Aparatur Gampong**		**168.900.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	***Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa***	***100 95***	***0***	***14.71 95***			***386.500.000,00***	***292.700.000,00***	***346.700.000,00***	***-39.800.000,00***						***51.47 95***	***168.900.000,00***	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				68 Desa	68 Desa	386.500.000,00	292.700.000,00	346.700.000,00	-39.800.000,00							168.900.000,00	
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa*				3 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*				5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	40.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			108.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	*Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas*				68 Orang	0 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa*				1 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*				1 Laporan	1 Laporan	169.500.000,00	0,00	0,00	-169.500.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*				-	2 Laporan	0,00	177.700.000,00	231.700.000,00	231.700.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa*				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	*Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas*				68 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	*Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa*				68 Desa	68 Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**				**54,10 76,47 Persen Persen**	**100 76,47 Persen Persen**	**419.000.000,00**	**100.000.000,00**	**633.400.000,00**	**214.400.000,00**					**Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)**		**428.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan]	***Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat*** ***Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)***	***66.18*** ***86.27***	***0***	***29.41*** ***73.53***			***419.000.000,00***	***100.000.000,00***	***633.400.000,00***	***214.400.000,00***						***36.76*** ***76.47***	***428.600.000,00***	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan				68 Desa	68 Desa	419.000.000,00	100.000.000,00	633.400.000,00	214.400.000,00							428.600.000,00	
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*				1 Dokumen	0 Dokumen	33.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*				-	3 Dokumen	0,00	0,00	43.400.000,00	43.400.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			84.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				1 Lembaga	1 Lembaga	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				-	68 Lembaga	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas, dan Berdaya Saing			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*				1 Dokumen	2 Dokumen	286.000.000,00	100.000.000,00	540.000.000,00	254.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			314.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
	J U M L A H								**4.349.042.182,00**	**3.736.059.080,00**	**4.653.459.080,00**	**304.416.898,00**							**3.872.017.347,00**	

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2026 mengacu pada Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Perubahan RKPK Tahun 2026 dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026 maka diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi Triwulan II Tahun 2026 serta memperhatikan Visi, Misi dan Program Wali Kota terpilih.

Selain itu, Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2026 ini merupakan masukan utama untuk penetapan rencana kegiatan yang dibiayai dari Perubahan APBK Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2026 diharapkan akan sangat membantu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Lhokseumawe serta program prioritas Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe, September 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Gampong Kota Lhokseumawe

SAFRIADI, S.STP, M.S.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19841117 200312 1 003

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
Jln. Sultanah Nahrasiyah No. 4 Telp. (0645) 42587 Fax (0645) 42587
LHOKSEUMAWE 24351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 08 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Lhokseumawe Nomor: 000.8.2.4/646/SE/2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, perlu dilakukan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2026;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Qanun nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe tahun 2025-2029;
11. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe;
12. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
13. Surat Edaran Wali Kota Lhokseumawe Nomor : 000.8.2.4/646/SE/2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2026 yang selanjutnya disebut “Tim Penyusun Perubahan Renja”, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong ini;

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Renja bertugas untuk:
a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026;
b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara; dan
c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana kerja perangkat daerah

KETIGA : Tim Penyusunan Perubahan Renja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Kota Lhokseumawe;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 09 Juni 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN GAMPONG
KOTA LHOKSEUMAWE



SAFRIADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN GAMPONG KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 08 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
PERUBAH RENCANA KERJA PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN GAMPONG
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Safriadi, S.STP, M.S.M	Kepala Dinas	Ketua	
2.	Lham Syah Putra, S.STP, M.Si	Sekretaris	Sekretaris	
3.	Dra. Murniati, MSP	Kepala Bidang Bina Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Gampong	Anggota	
4.	Lely Fitri Yanti Hatta, SP, MSP	Kepala Bidang Pemberdayaan Mukim, Gampong dan Kelembagaan Masyarakat	Anggota	
5.	Yusliana, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
6.	Yuni Rahma Siregar, S.STP, M.Si	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota	
7.	Suci Puji Suryani, SE, M.S.M	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota	
8.	Dedy Iswardy, ST	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota	
9.	Nurfatmi, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
10.	Epita Sari	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Anggota	
11.	Reni Yanda Sari, SE	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Anggota	
12.	Darmiati, S.Sos	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Anggota	

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN GAMPONG
KOTA LHOKSEUMAWE

SAFRIADI